



## Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International

Muhammad Arief Virgy<sup>1\*</sup>, Yusa Djuyandi<sup>1</sup>, Wawan Budi Darmawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363 Bandung, Jawa Barat Indonesia

### Info Artikel:

Dikirim: Nov 13, 2019

Diterima: Jan 22, 2020

Dipublikasi: Jan 24, 2020

### Kata Kunci:

Deforestasi;

Kelapa Sawit;

Greenpeace Indonesia;

Wilmar International;

Jaringan Advokasi;

Transnasional

### Koresponden:

Muhammad Arief Virgy,

Departemen Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran

### Email:

arieffirggy@gmail.com

### Cantuman Sitasi:

Virgy, Muhammad Arief *et.al.* 2020. Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues* 1(2), 74-91. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1.i2.9>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1.i2.9>

### Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International  
(CC BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

**Abstract** Greenpeace Indonesia looking for Wilmar International as actor for making deforestation.. Greenpeace Indonesia pressured Wilmar International to commit to implementing their No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policy through the establishment of a transnational advocacy network to make enough power to put pressure on Wilmar International. Through this method, Greenpeace Indonesia succeeded in making Wilmar International pressured and changed its behavior. This research analyzes how Greenpeace Indonesia's strategy in forming transnational advocacy networks so that the network suppresses and monitors the behavior of target actor through the Keck & Sikkink Transnational Advocacy Network theory. Researchers used qualitative methods with a case study approach. Data collection comes from primary and secondary data and data collection through literature studies from books, journals and articles. The results of this study indicate that Greenpeace Indonesia is very optimal in carrying out Information Politics and Leverage Politics strategies. Greenpeace Indonesia has creative and confrontational methods in implementing the Symbolic Politics strategy. But the weakness of this strategy is that Greenpeace Indonesia seems to be exclusive in carrying out its actions by other environmental NGOs, especially domestic-based environmental NGOs. The weaknesses of these four strategies are Accountability Politics where Greenpeace Indonesia does not have the commitment of Wilmar International which has binding legal force.

**Abstrak** Greenpeace Indonesia saat ini menyoroti Wilmar Internasional sebagai pelaku deforestasi. Greenpeace Indonesia menekan Wilmar International untuk berkomitmen mengimplementasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) mereka lewat pembentukan jaringan advokasi transnasional guna membuat powernya cukup untuk menekan Wilmar International. Lewat metode tersebut, Greenpeace Indonesia berhasil membuat Wilmar International terdesak dan merubah perilakunya. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Greenpeace Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional hingga jaringan tersebut menekan dan memantau perilaku aktor target melalui teori *Transnational Advocacy Network* Keck & Sikkink. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berasal dari data primer dan sekunder serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia sangat optimal dalam melakukan strategi *Information Politics* dan *Leverage Politics*. Greenpeace Indonesia memiliki metode yang kreatif dan konfrontatif dalam mengimplementasikan strategi *Symbolic Politics*. Tetapi kelemahan dari strategi ini yaitu Greenpeace Indonesia terkesan eksklusif dalam melakukan aksi-aksinya oleh NGO lingkungan lain khususnya NGO lingkungan yang basisnya domestik. Kelemahan dari empat strategi ini yaitu *Accountability Politics* dimana Greenpeace Indonesia tidak memiliki komitmen dari Wilmar International yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Greenpeace Indonesia hanya mengandalkan tekanan publik dalam menekan Wilmar International guna berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE.

### Tentang Penulis:

**Muhammad Arief Virgy**, menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 2019.

**Yusa Djuyandi**, menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

**Wawan Budi Darmawan**, menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

**PENDAHULUAN**

Perluasan areal perkebunan kelapa sawit Indonesia dilakukan sebagai akibat dari predikatnya sebagai eksportir kelapa sawit terbesar dunia sehingga hal ini memicu praktik deforestasi berkembang. Dari tahun ke tahun, luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tersebut berkisar antara 2,77 sampai dengan 4,70 persen per tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar, meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 7,60 persen. Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit menurun sebesar 0,52 persen dari tahun 2015 menjadi 11,20 juta hektar. Selanjutnya, pada tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan kembali mengalami peningkatan 9,80 persen dari tahun 2016 menjadi 12,30 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2018). Bila dikalkulasikan dari tahun 1995 hingga 2015, laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun (Austin K. , 2017). Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia 24 juta hektar (ha) hutan hujan Indonesia dihancurkan dalam kurun waktu 1990 hingga 2015 dan 19% deforestasi yang dilakukan antara tahun 2015 – 2017 terjadi di konsesi kelapa sawit (Greenpeace Indonesia, 2018). Riset lain yang berasal dari Kemen G Austin, Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit dari tahun 2001-2016 menyebabkan hilangnya 23 persen hilangnya tutupan hutan Indonesia (Austin K. G., 2019)

Oleh karenanya, pengembangan minyak kelapa sawit melalui perluasan areal perkebunan kelapa sawit menyebabkan keanekaragaman hayati berkurang seperti makin berkurangnya spesies langka macam harimau sumatera dan orang utan (Brown & Jacobson, 2005). Selain itu, konversi kebun kelapa sawit untuk tanah hutan hujan tropis menyumbang emisi karbon sebanyak 610 Mg of CO<sub>2</sub><sup>ha-1</sup> dan untuk lahan gambut sebanyak 6000 Mg of CO<sub>2</sub><sup>ha-1</sup> (Fargione, J. Hill, Tilman, Polasky, & Hawthorne, 2008). Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global terbesar disamping Amerika Serikat dan China (Titiyoga, 2015).

Isu ini tak pelak menjadi perhatian NGO (Non Governmental Organization) yang berfokus pada isu lingkungan, termasuk isu Deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit. Wilmar International sebagai produsen yang tergabung dalam Consumer Goods Forum menjadi aktor yang paling disorot oleh Greenpeace Indonesia dikarenakan tidak adanya komitmen untuk merealisasikan janji yang telah dibuat pada tahun 2013 guna mencegah rantai pasok kelapa sawit hasil deforestasi dan janji tersebut memiliki tenggat waktu untuk diimplementasikan paling lambat pada tahun 2020 (Greenpeace Indonesia, 2018). Wilmar International sendiri merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 40% perdagangan global dan aktor pertama yang mempublikasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy (NDPE). Wilmar International juga tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen yang melakukan praktik deforestasi, tetapi juga Wilmar International menjadi rute utama ke pasar dari produsen-produsen tersebut. Hal tersebut terbukti dari pasokan minyak wilmar dimana sebanyak 80% dipasok dari pihak ketiga (Greenpeace Indonesia, 2018).

Greenpeace Indonesia sebagai salah satu NGO yang berfokus pada isu lingkungan memiliki tujuan untuk menghentikan laju deforestasi hutan Indonesia dan lahan gambut yang hilang yang diakibatkan oleh masifnya industri kelapa sawit. Greenpeace Indonesia melakukan beberapa metode advokasi dimulai dari publikasi laporan terhadap suatu isu hingga konfrontasi langsung terhadap aktor targetnya. Salah satu manifestasi dari advokasi tersebut yaitu adanya sebuah kampanye anti deforestasi terhadap salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia yakni Wilmar International. Wilmar International ditenggarai

melakukan praktik deforestasi hutan Indonesia sebagai implikasi dari adanya kegiatan produksi minyak kelapa sawit yang dilakukannya.

Wilmar International menyangkal tuduhan yang disematkan padanya. Tumanggor, Direktur PT. Wilmar Nabati Indonesia menyebutkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Agar dapat mengimplementasikan komitmen Wilmar International dalam menerapkan kebijakan NDPE, maka Greenpeace Indonesia menuntut Wilmar International untuk mempublikasikan peta-peta konsesi guna mengetahui seluruh operasi dan memutus rantai pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi. Namun, Wilmar International menyangkal bahwa hal tersebut tidak dilakukan karena publikasi peta konsesi memerlukan perizinan dari Kepala Daerah setempat dan menyalahi aturan jika tidak melalui aturan-aturan perizinan (Safitri, 2018).

Karena Wilmar International tidak mempublikasikan peta konsesinya sebagai manifestasi komitmen kebijakan NDPE, maka Greenpeace Indonesia pun melakukan advokasi terhadap Wilmar International agar mengubah kebijakannya guna berkomitmen terhadap kebijakan NDPE. Advokasi yang dibangun oleh Greenpeace Indonesia ternyata mendapatkan respon dari Wilmar International. Wilmar International menggandeng Aidenvironment untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang dijual oleh Wilmar International bebas dari deforestasi (Safitri, 2018). Aidenvironment merupakan konsultan independen yang berfokus pada isu perubahan iklim. Keputusan tersebut diambil karena adanya tekanan dari Greenpeace Indonesia yang kerap menuding bahwa pemasok sawit Wilmar International melakukan deforestasi hutan. Selain itu, Wilmar International juga berkomitmen pada akhir 2019 akan menggunakan satelit guna memantau semua pemasok minyak kelapa sawitnya sehingga pemasok minyak kelapa sawit Wilmar International yang melakukan praktik Deforestasi akan mudah ditelusuri, termasuk peta konsesi yang belum tercantum (Greenpeace Indonesia, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia berhasil menekan Wilmar selaku produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia.

Greenpeace Indonesia sebagai NGO yang berfokus pada isu lingkungan tidak memiliki power yang cukup untuk bisa mengubah arah kebijakan dari Wilmar International. Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia membentuk suatu jaringan advokasi yang bersifat transnasional guna menekan Wilmar International agar mengubah arah kebijakannya. Jaringan tersebut dapat membuat suatu aktor memobilisasi informasi secara strategis suatu isu guna membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh dari organisasi lain serta pemerintah yang jauh lebih kuat dari aktor yang memobilisasi jaringan (Keck & Sikkink, 1998).

Untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Greenpeace Indonesia, maka peneliti menggunakan teori *transnational advocacy network* sebagai alat analisisnya. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana suatu NGO melakukan pengorganisasian dengan membuat suatu jaringan yang terstruktur untuk menekan suatu aktor dalam pembuatan kebijakan. Cakupan jaringan yang dibentuk tidak hanya domestik, melainkan juga transnasional (1998). Untuk menjalankan strategi ini, maka digunakanlah empat komponen strategi yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

*Information politics* merupakan strategi penggunaan data, riset, dan menganalisisnya untuk dijadikan bahan advokasi dan kampanye yang suatu NGO lakukan dan k. *Information politics* juga merupakan suatu kemampuan untuk mentransfer informasi dengan cepat yaitu informasi politik yang memiliki keuntungan dan memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya dengan kata lain faktual. *Symbolic politics* merupakan kemampuan dalam memberikan suatu kesan yang kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita dimana nantinya dapat berguna untuk melukiskan, atau menggambarkan situasi ataupun tuntutan terhadap individu. *Leverage politics* yaitu strategi yang menggunakan jejaring dari pihak NGO yang dalam posisi lebih

lemah untuk mengajak partisipasi NGO yang lebih kuat pengaruhnya dalam proses menjalankan kampanyenya. Terakhir yaitu *accountability politics* dimana tujuan dari strategi ini adalah untuk mengikat komitmen dari aktor yang lebih kuat guna sepenuhnya menjalankan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan Greenpeace Indonesia sebagai unit analisis dan Wilmar International sebagai aktor targetnya, terkait advokasi kasus deforestasinya diteliti dalam rentang waktu 2013 hingga 2018. Rentang waktu yang diteliti dalam penelitian ini dipilih karena advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia merupakan advokasi lanjutan dari advokasi sebelumnya dimana pada tahun 2013 Wilmar International sudah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan NDPE pada Desember 2013. Namun, praktik deforestasi nyatanya tidak menemui perlambatan dan bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 Wilmar International kembali berkomitmen untuk menerapkan kebijakan NDPE.

## METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teori penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Cresswell, 2012) dan teknik pengumpulan data melalui wawancara kualitatif dan dokumen kualitatif (Cresswell, 2012). Dalam menentukan informan teknik purposive dan teknik snowball. Teknik *Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Sedangkan teknik *Snowball* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2011). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pengurus Greenpeace Indonesia. Untuk mendapatkan kedalaman informasi mengenai jaringan yang dibentuk oleh Greenpeace Indonesia, maka peneliti memilih beberapa nama dari anggota NGO yang direkomendasikan oleh pengurus Greenpeace Indonesia. Selain itu, peneliti juga mewawancarai ahli hukum internasional dan hukum lingkungan guna menganalisis dokumen-dokumen komitmen kebijakan NDPE dari Wilmar International yang dirilis ke publik. Data sekunder diperoleh dari berita, literatur jurnal, buku, dan artikel. Melalui informasi-informasi tersebut, peneliti mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data tersebut untuk kemudian ditafsirkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Data-data yang dimaksud seperti metode Greenpeace Indonesia menyebarkan informasi mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International, aksi-aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia kepada Wilmar International maupun konsumennya, tekanan yang dilakukan oleh jaringan Greenpeace Indonesia terhadap aktor yang berkaitan dengan Wilmar International, hingga dokumen legal yang didapatkan oleh Greenpeace Indonesia sebagai jaminan untuk perubahan perilaku dari Wilmar International. Untuk memvalidasi data, peneliti melakukan triangulasi dan konsultasi dengan ahli. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu data yang diperoleh dari informan melalui berbagai sumber baik data. Waktu penelitian sendiri dimulai dari Februari 2019 hingga September 2019. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu reduksi data, data *display*, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna membentuk jaringan advokasi transnasional serta menekan dan memantau perilaku dari Wilmar International, Greenpeace Indonesia menggunakan strategi-strategi sebagaimana dijelaskan oleh Keck and Sikkink (1998) yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, and *accountability politics*.

---

**Information Politics**

*Information Politics* dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dengan menggunakan cara mempublikasi beberapa laporan yang dapat diunduh oleh publik pada laman resmi serta pada akun ofisial sosial media dari Greenpeace Indonesia. Laporan-laporan mengenai kasus deforestasi yang dilakukan Wilmar International dapat diakses pada laman resmi Greenpeace Indonesia.<sup>1</sup> Dari laporan-laporan tersebut, Greenpeace Indonesia memberikan informasi bahwa Wilmar International menjadi aktor yang tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen-produsen yang melakukan deforestasi, tetapi Wilmar International menjadi rute utama produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global.

Seluruh laporan yang dipublikasikan Greenpeace Indonesia mengenai kasus deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International merupakan hasil dari riset mendalam yang dilakukan oleh Tim Riset Khusus Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Tim riset ini melakukan investigasi mengenai rantai pasok untuk mengetahui dari mana saja Wilmar International mendapatkan minyak kelapa sawitnya hingga kepada siapa saja Wilmar International menjual minyak kelapa sawitnya. Dengan demikian, Greenpeace Indonesia mengetahui bagaimana hubungan antara Wilmar International dengan produsen minyak kelapa sawit lain serta hubungan antara Wilmar International dengan *consumer brand* terkenal. Dalam proses risetnya, Greenpeace Indonesia menggunakan prinsip *scientific based* dengan beberapa sumber data, di antaranya adalah data ofisial dari pemerintah karena kredibilitasnya sudah terjamin.<sup>2</sup> Data dari pemerintah tersebut kemudian diolah dan diinvestigasi langsung ke lapangan sesuai dengan prinsip dari Greenpeace sendiri yaitu *Bearing Witness* atau menyaksikan langsung kejadian di lapangan serta mewawancarai langsung penduduk setempat yang merasakan dampak deforestasi dari perluasan perkebunan kelapa sawit.<sup>3</sup> Selain itu, Greenpeace Indonesia menggunakan teknologi *analysis mapping* melalui *GIS (Geographic Information System) Mapping*. Data-data tersebut kemudian dipublikasikan pada laporan-laporan Greenpeace Indonesia yang dapat diakses publik dengan harapan bahwa publik mendapatkan paparan informasi yang cukup mengenai fokus isu yang diangkat Greenpeace Indonesia terhadap aktor targetnya yaitu Wilmar International, sehingga publik, termasuk NGO yang berfokus pada isu yang sama, diharapkan memiliki kesadaran terhadap isu yang cukup dan mendukung gerakan Greenpeace Indonesia terhadap Wilmar International.

Internet sendiri merupakan jenis media yang cepat menjangkau publik serta murah (Keck & Sikkink, 1998), sehingga Greenpeace Indonesia memilih menggunakan internet sebagai medium untuk menyebarkan informasi mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi NGO untuk membangun basis jaringannya, sehingga mereka memperoleh *power* dari komitmen dan energi aktivis yang memiliki fokus isu yang sama (Mansell & Wehn, 1998). Oleh karenanya Greenpeace Indonesia dapat dengan lebih mudah menjalin jaringan dengan beberapa NGO yang memiliki fokus yang sama seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka.

Laporan-laporan yang Greenpeace Indonesia meliputi *License to Kill* (Greenpeace Indonesia, 2013) yang dikeluarkan pada Oktober 2013 menyebutkan antara tahun 2009 hingga 2011 telah terjadi ekspansi secara besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan rusaknya habitat Harimau Sumatera dan laporan tersebut juga menyebutkan

---

<sup>1</sup> Dapat diakses di <http://www.greenpeace.org/indonesia>

<sup>2</sup> Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019

<sup>3</sup> *Ibid*

adanya afiliasi *brand* besar terhadap Wilmar International. *Under Fire* (Greenpeace Indonesia, 2015) yang dikeluarkan pada November 2015 menyebutkan perusahaan-perusahaan pemasok minyak kelapa sawit Wilmar International melakukan deforestasi melalui metode pembakaran lahan hutan dan menyebabkan dampak kesehatan yang masif terhadap masyarakat sekitar. *Deadly Trade Off* (Greenpeace Indonesia, 2016) yang dikeluarkan pada September 2016 melaporkan Wilmar International sebagai pemasok IOI disebut memiliki kegagalan sistemik dalam menjalankan kebijakan NDPE. *Dirty Bankers* (Greenpeace Indonesia, 2017) yang dikeluarkan pada Februari 2017 menyebutkan HSBC Holdings Plc sebagai penyedia jasa keuangan terbesar bagi produsen-produsen kelapa sawit pemasok Wilmar International melalui pinjaman serta fasilitas kredit lainnya. *Moment of Truth* (Greenpeace Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada Maret 2018 menyebutkan tidak adanya upaya transparansi yang memadai dari brand-brand besar dalam mengungkap rantai pasoknya guna mendukung kebijakan NDPE. *Rogue Trader* (Greenpeace Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada Juni 2018 menyebutkan hubungan antara Wilmar International dengan Gama. Terakhir yaitu *Final Countdown* (Greenpeace Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada September 2018 menyebutkan Wilmar International menjadi aktor target yang disebutkan bertanggungjawab terhadap deforestasi hutan Indonesia dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 dan menunjukkan bahwa Wilmar International tidak berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE yang telah disepakatinya sejak tahun 2013. Dari laporan-laporan tersebut, Greenpeace Indonesia memberikan informasi bahwa Wilmar International menjadi aktor yang tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen-produsen yang melakukan deforestasi, tetapi Wilmar International menjadi rute utama produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global.

Laporan-laporan tersebut dipublikasi lewat internet tersebut menjadi rujukan NGO-NGO lain untuk mengamplifikasi advokasi isu deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit ataupun isu deforestasi yang secara spesifik dilakukan oleh Wilmar International. Laporan tersebut menjadi acuan NGO-NGO lain untuk memonitor dari implementasi komitmen kebijakan NDPE yang dikeluarkan oleh Wilmar International maupun produsen lain hingga memonitor Wilmar International maupun produsen lain untuk menerapkan pengembangan kebijakan *mapping platform* guna melacak deforestasi di seluruh rantai pasoknya. Walaupun metode advokasinya berbeda dengan Greenpeace Indonesia dimana Greenpeace Indonesia menasar *market brand* sebagai metodenya, namun NGO-NGO tersebut merasa terbantuan oleh Greenpeace Indonesia dikarenakan informasi yang disebarkan oleh Greenpeace Indonesia dapat menambah referensi NGO-NGO dalam mengadvokasikan isu deforestasi akibat tata kelola industri kelapa sawit yang masih buruk.<sup>4</sup>

Pada dasarnya *information politics* digunakan untuk membuat jaringan advokasi transnasional oleh Greenpeace Indonesia. Tujuan dari strategi ini adalah membentuk satu kesepahaman bahwa isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International perlu mendapatkan perhatian lebih oleh NGO-NGO lain. NGO-NGO ini memiliki satu kesepahaman dengan Greenpeace Indonesia bahwa industri kelapa sawit Indonesia perlu dibenahi, terutama perihal transparansi data konsesi kelapa sawit yang selama ini kerap menjadi masalah, dan hal ini juga menjadikan Wilmar International bermasalah.<sup>5</sup> Selain itu, informasi yang disebarkan oleh Greenpeace Indonesia membuat NGO-NGO lain juga memiliki kesepahaman bahwa ekspansi hutan dan lahan gambut oleh perkebunan kelapa sawit harus dihentikan. Kesepahaman inilah yang membuat Greenpeace Indonesia beserta NGO-NGO lain seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka membentuk jaringan berupa koalisi dalam beberapa isu, semisal koalisi untuk meninjau dan perbaikan ISPO,

<sup>4</sup> Teguh Surya, wawancara pribadi, 1 Juli 2019.

<sup>5</sup> *Ibid*

koalisi untuk meninjau program restorasi gambut, hingga koalisi untuk mendorong adanya transparansi data konsesi kelapa sawit. Walaupun koalisi ini tidak ditunjukkan langsung kepada Wilmar International, namun koalisi ini memiliki kaitannya dengan isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International, sehingga gerakan Greenpeace Indonesia dapat teramplifikasi dengan baik oleh koalisi-koalisi yang terbentuk.

Dalam tahapan *information politics*, persebaran informasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia berbasiskan *scientific based*. Ketidakpastian data dan fakta adalah salah satu dimensi yang paling sering ditemui dari permasalahan lingkungan (Keck & Sikkink, 1998). Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia menggunakan penggunaan teknologi *mapping* yang dipadukan dengan investigasi langsung ke lapangan serta penggunaan data dari pemerintah membuat riset-riset dari Greenpeace Indonesia memiliki kredibilitas yang tinggi. Basis tersebut membuat eskalasi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia seperti kampanye dan lobi semakin kuat. Selain itu, penelitian dari peneliti Universitas Harvard dan Universitas Columbia terkait dampak dari deforestasi yang diakibatkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit menambah legitimasi dari Greenpeace Indonesia untuk mengadvokasi isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International (Koplitz SN, 2016).

Greenpeace Indonesia menyadari, bahwa agar publik memiliki kepedulian dan respon terhadap isu yang digaungkan, maka diperlukan edukasi terkait perspektif moral serta data dan fakta yang bersifat *scientific* (Mate, 2001). Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia memeberkan informasi mengenai tiadanya jaminan dari Wilmar International untuk menerapkan kebijakan NDPE dalam rantai pasoknya yang termanifestasi dari laporan-laporan mengenai analisis pemetaan terhadap lahan produksi Wilmar International serta perusahaan-perusahaan pemasoknya. Selain itu, masyarakat hanya akan membeli produk-produk rumah tangga yang terbebas dari praktik eksploitasi lingkungan ketika mereka mendapatkan informasi yang kredibel. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki akses informasi mengenai dampak lingkungan maupun sosial dari produk yang mereka beli (O'Rourke, 2005). Dengan demikian, Greenpeace Indonesia tampil untuk memberikan informasi alternatif yang kredibel mengenai produk-produk yang biasa dibeli oleh masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat membeli produk yang produksinya memperhatikan aspek lingkungan.

Agar mendapatkan simpati publik, Greenpeace Indonesia juga menggunakan narasi atau cerita dari dampak yang dihasilkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Contohnya, Greenpeace Indonesia menggunakan narasi bahwa akibat adanya aktivitas perluasan perkebunan kelapa sawit, menyebabkan adanya penurunan secara signifikan populasi hewan langka, terutama Harimau Sumatera dan Orang Utan (Greenpeace Indonesia, 2013). Greenpeace Indonesia juga menggunakan narasi dampak dari metode deforestasi berupa pembakaran lahan yang mengakibatkan adanya kematian sebanyak 100.000 jiwa dan ditenggarai disebabkan oleh penyakit pernapasan akibat kabut asap (Greenpeace Indonesia, 2018). Narasi-narasi tersebut digunakan karena apabila tidak ada contoh dampak yang memiliki efek yang nyata, maka para aktivis tidak dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan penghentian praktik deforestasi (Keck & Sikkink, 1999). Dengan ada narasi tersebut, baik aktivis maupun orang yang sebelumnya tidak *aware* terhadap permasalahan deforestasi dapat memiliki *awareness* yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, guna membuat Wilmar International mau membuka dialog dan lobi dengan Greenpeace Indonesia, maka metode yang digunakan yaitu *naming and shaming* atau memperlakukan Wilmar International dihadapan publik.<sup>6</sup> Data dan informasi mengenai deforestasi, rantai pasok, konflik agraria, hingga eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh Wilmar International tersebut merepresentasikan strategi *naming and shaming* dari Greenpeace Indonesia.

---

<sup>6</sup> Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019.

Persebaran informasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat, seperti misalnya persepsi publik yang mempengaruhi harga saham Wilmar International yang anjlok di pasar saham (Wihardandi, 2013). Selain itu, persebaran informasi mengenai deforestasi dalam konsesi di Gama, anak perusahaan Wilmar International, juga mengakibatkan pendiri Wilmar International Martua Sitorus dan Kepala Perwakilan Wilmar International untuk Indonesia Hendri Saksti mundur dari Wilmar International (Kabar Energi, 2018) (Daubach, 2018). Greenpeace Indonesia dengan strategi *naming and shaming*-nya berusaha memecahkan *comfort zone* dari Wilmar International melalui pemberian edukasi kepada publik mengenai permasalahan deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Greenpeace Indonesia menggunakan cara persuasi dan *issue framing* untuk memenangkan simpati publik dengan menggunakan kekuatan data dan informasi sebagai basis eskalasi advokasi yang dilakukan sehingga memiliki legitimasi yang cukup untuk menekan Wilmar International. Dengan demikian, gerakan yang diinisiasi oleh Greenpeace Indonesia dapat lebih masif berkat dukungan dari publik yang sudah teredukasi dan mengetahui data dan fakta mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International.

Selanjutnya, untuk memecah *comfort zone* dari Wilmar International, Greenpeace Indonesia juga memeberkan data dan fakta mengenai rantai pasok dari Wilmar International hingga konsumen dari Wilmar International seperti Colgate Palmolive, Mondelez International, Nestle Oil, Procter & Gamle, Reckitt Benckiser, dan produk lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermalukan perusahaan-perusahaan yang terlibat aktivitas dagang dengan Wilmar International sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menekan Wilmar International melalui pemutusan hubungan dagang atau kerjasama dalam segala bentuk. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga memeberkan data mengenai aliran dana dari Bank terkemuka agar dapat memutus aliran dana terhadap Wilmar International beserta perusahaan produsennya. Hal ini dilakukan agar Wilmar International berada pada posisi terdesak untuk melaksanakan tuntutan dari Greenpeace Indonesia yaitu menerapkan kebijakan NDPE. Taktik ini sesuai dengan model analisa dari Gritten dan Mola-Yudego (2010) yaitu *Blanket Strategy* dimana NGO melakukan tekanan terhadap pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan aktor target untuk selanjutnya tekanan tersebut diteruskan oleh pihak ketiga kepada aktor target.

Greenpeace Indonesia sebagai *political entrepreneur* dapat memobilisasi sumber daya informasi dikarenakan adanya struktur peluang politik di Indonesia. Kondisi politik suatu negara menjadi hal yang penting karena hal tersebut mempengaruhi keterbukaan akses informasi. Sejak beralihnya Indonesia ke sistem politik yang lebih demokratis, otomatis keterbukaan akses informasi menjadi ada dibandingkan pada masa dimana Indonesia memiliki sistem politik yang sentralistik dan tertutup. Struktur peluang politik menjadi salah satu variabel dinamika protes mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia (Situmorang, 2013). Karena akses informasi yang terbuka di Indonesia, Greenpeace Indonesia menggunakan media untuk memobilisasi masyarakat Indonesia dan global agar mengetahui isu deforestasi yang sedang berlangsung di Indonesia, dengan Wilmar International sebagai aktor utama yang bertanggungjawab terkait isu tersebut.

Untuk mendapatkan perhatian publik, selain membagikan informasi perihal dampak nyata akibat deforestasi, juga perlu memperhatikan waktu yang tepat untuk membagikan informasinya sehingga mendapat perhatian dari publik (Keck & Sikkink, 1998). Namun, dalam tahapan *information politics*, hal yang belum dilakukan oleh Greenpeace Indonesia adalah mengemas informasi terkait deforestasi oleh Wilmar International dalam waktu yang tepat sehingga kurang mendapat atensi dari masyarakat Indonesia akan substansi yang berusaha ingin disampaikan. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa informasi yang disampaikan Greenpeace Indonesia terkait Wilmar International adalah *black campaign* dan mengancam komoditas kelapa sawit Indonesia yang notabene merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar dunia. Padahal, Greenpeace Indonesia telah menyatakan bahwa

apa yang dilakukan olehnya bukan merupakan bentuk dari gerakan anti sawit. Bahkan, Greenpeace Indonesia mengakui bahwa sawit merupakan komoditas penting untuk perekonomian Indonesia. Apabila Greenpeace Indonesia menyebarkan informasi pada saat waktu yang tepat, maka atensi publik akan meningkat sehingga mengamplifikasi pesan yang berusaha disampaikan.

### Symbolic Politics

*Symbolic Politics* digunakan oleh Greenpeace Indonesia untuk menarik perhatian masyarakat sehingga dapat menggiring opini publik. Mereka menggunakan metode aksi kreatif agar masyarakat memiliki perhatian lebih terhadap isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Aksi kreatif juga merupakan bentuk untuk memperkuat laporan yang sebelumnya sudah dipublikasikan. Tujuan dari penggunaan metode ini seperti halnya kampanye pada umumnya yaitu bermaksud untuk mengubah pola pikir masyarakat ataupun perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Melakukan sesuatu yang dimaksud yaitu untuk melindungi hutan Indonesia yang habis akibat perilaku deforestasi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Untuk mendapatkan atensi sehingga masyarakat terinspirasi oleh pesan yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia maka prinsip seperti *non-violent direct action* dilakukan pada setiap aksi kreatifnya.<sup>8</sup> Prinsip tersebut dilakukan oleh Greenpeace Indonesia agar dapat diinterpretasikan dan diidentifikasi dengan mudah bahwa kampanye yang diusung oleh Greenpeace Indonesia merujuk pada isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International dan pihak-pihak yang terlibat dengannya. Hal ini penting dilakukan mengingat seperti yang dikatakan oleh Keck & Sikkink (1998), bahwa kampanye perlu dilakukan oleh NGO melalui beberapa area yang simbolis atau menggunakan barang (*item*) yang dapat dengan mudah diingat dan diidentifikasi oleh publik dengan isu dan kampanye yang sedang berlangsung.

Aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi simbolik adalah bagian dari proses persuasi yang dengannya jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi mereka (Keck & Sikkink, 1998). Dengan demikian, aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mengamplifikasi jaringan dengan Greenpeace lainnya, terutama Greenpeace US dan Greenpeace Uni Eropa. Greenpeace Indonesia membangun koalisi dengan jaringannya di Eropa dan US tersebut agar terbentuk adanya kesepakatan dan saling mengerti untuk bekerja sama sehingga jaringan ini bisa menguatkan satu sama lain. Greenpeace Indonesia menyadari bahwa agar permasalahan lokal menjadi isu transnasional, maka hal yang perlu dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yaitu menjalin hubungan dengan para juru kampanye yang bekerja pada masalah yang sama atau serumpun di daerah lain.

Aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dianggap memiliki kreatifitas oleh NGO lain dengan sifatnya yaitu Kreatif dan Konfrontatif.<sup>9</sup> Mereka memiliki mesin yang mumpuni untuk melakukan serangkaian aksi tersebut sehingga dapat menginspirasi NGO-NGO lokal lain untuk melakukan aksi yang memiliki kreatifitas tersebut. Namun, Greenpeace Indonesia dalam melakukan serangkaian aksi seringkali di rasa eksklusif oleh NGO lain dikarenakan mereka jarang bahkan tidak melibatkan aksi-aksi kreatif yang kerap dilakukannya dengan koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya seperti koalisi untuk meninjau dan perbaikan ISPO, koalisi untuk meninjau program restorasi gambut, hingga koalisi untuk

---

<sup>7</sup> Annisa Rahmawati, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Teguh Surya, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2019

mendorong adanya transparansi data konsesi kelapa sawit.<sup>10</sup> Hal tersebut terjadi dikarenakan aksi-aksi yang dilakukan memiliki resiko tinggi bagi keselamatan para juru kampanyenya, sehingga Greenpeace Indonesia tidak menyertakan NGO lain dalam aksi kreatifnya dikarenakan orang yang mengikuti aksi dari Greenpeace Indonesia memerlukan keahlian khusus. Untuk mengikuti serangkaian aksi tersebut, para juru kampanye perlu mengikuti pelatihan khusus dan harus lulus dalam pelatihan tersebut sehingga dapat dianggap layak mengikuti aksi. Aksi-aksi seperti memanjat gedung tinggi, pembentangan spanduk pada lahan konsesi, hingga penghentian bulldozer di area hutan merupakan beberapa contoh aksi yang memerlukan pelatihan khusus dikarenakannya sifatnya yang memiliki resiko tinggi.

Selain dilakukan di Indonesia, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa yaitu Greenpeace Unit Eropa melakukan aksi kreatif di Negara-negara Uni Eropa. NGO menggunakan jejaring advokasi transnasionalnya untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran akan isu yang diadvokasikan oleh NGO tersebut dalam kampanyenya (Keck & Sikkink, 1998). Kampanye lingkungan di daerah setempat mungkin gencar, inventif, dan terkadang berlarut-larut, tetapi NGO biasanya tidak dapat mewujudkan tujuan mereka karena pihak yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi daerah setempat bukanlah NGO itu sendiri (Rootes, 2013). Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa melakukan aksi di daerah yang pemerintahannya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia. Alasan aksi dilakukan di daerah Uni Eropa didasarkan pada dua hal, *pertama* kawasan Uni Eropa saat ini merupakan salah satu importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, *kedua* sejak 4 April 2017, Uni Eropa menerapkan peraturan non-tarif barang-barang impor, yakni resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa berjudul *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) (European Union, 2017), dimana Parlemen Eropa merasa bahwa perlu adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar perkebunan berkelanjutan. Sebelumnya, Indonesia sudah mengeluarkan skema sertifikasi untuk kelapa sawit yang dinamakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak tahun 2011 yang memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia memenuhi kriteria *Good Agricultural Practices* yang sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan (Pink, 2019). Namun, Uni Eropa belum mengakui ISPO sebagai sertifikasi yang menjamin kelapa sawit Indonesia memenuhi kaidah perkebunan berkelanjutan sehingga komoditas tersebut menjadi sulit untuk masuk ke pasar Uni Eropa (Ammurabi, 2019). Peraturan ini dimaksudkan untuk menyortir minyak kelapa sawit yang masuk ke Uni Eropa. Sebelum menerima minyak kelapa sawit, Uni Eropa akan terlebih dahulu memeriksa bagaimana kelapa sawit ditanam dan diproses. Ketika ada ketidaksesuaian terhadap mereka, maka pembelian akan dihentikan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk memicu perluasan isu deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit kepada publik, terutama Uni Eropa dimana sejak 4 April 2017 mereka telah menerapkan kebijakan impor kelapa sawit yang harus diproduksi dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.

Inilah momentum yang dimanfaatkan oleh Greenpeace Indonesia untuk melakukan aksi kreatif terhadap Wilmar International di kawasan Uni Eropa. Pada November 2018 Greenpeace Indonesia melakukan aksi menaiki kapal tanker Stolt Tenacity yang berisikan minyak kelapa sawit Wilmar International dan dibawa dari kilang Wilmar International di Dumai, Indonesia. Aksi tersebut terjadi di Perairan Teluk Cadiz di dekat Spanyol. Para aktivis Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan “selamatkan hutan hujan kami” dan “hentikan produksi minyak kelapa sawit kotor” (BBC Indonesia, 2018). Respon dari Uni Eropa terhadap aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia pun mendukung terhadap aksi tersebut. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerent, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan manifestasi dari kepedulian terhadap aspek keberlanjutan dari

---

<sup>10</sup> *Ibid*

komoditas kelapa sawit (Pramudyani, 2018). Bahkan, menurut Guerent, untuk mencegah hal serupa terjadi, kalangan industri harus menanggapi isu tersebut dengan serius. Berbeda dengan respon publik Indonesia, dimana pengusaha-pengusaha kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai bahwa aksi tersebut telah mengganggu kedaulatan Indonesia (Reily, 2018). Hal serupa pun dikatakan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia yang menyesalkan aksi tersebut dan menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Greenpeace tidaklah beradab (Bayu, 2018).

### Leverage Politics

Dalam tahapan *leverage politics*, agar menjadikan sebuah isu dapat dinegosiasikan, maka hal yang penting dilakukan sebelum tahapan ini adalah bagaimana NGO menjadikan sebuah isu menjadi penting bagi masyarakat dengan menggunakan strategi *information politics* dan *symbolic politics*. Greenpeace Indonesia sebelumnya telah melakukan kedua strategi tersebut dengan baik sehingga dapat menstimulasi terbentuknya jaringan advokasi yang memiliki fokus isu yang sama yaitu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Dengan demikian, *power* dari Greenpeace Indonesia teramplifikasi oleh jaringan yang dibuatnya sehingga cukup untuk menekan serta membuka jalan negosiasi dengan aktor yang lebih kuat—dalam hal ini yaitu Wilmar International. Kemudian, agar tekanan lebih masif dilakukan, maka jaringan ini tidak hanya menekan Wilmar International saja sebagai aktor target utama, tetapi juga menekan aktor-aktor lain baik yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan Wilmar International. Hal ini mengingat untuk membawa perubahan kebijakan, jaringan perlu menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan aktor-aktor yang lebih kuat, jaringan ini mendapatkan pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik-praktik aktor target secara langsung (Keck & Sikkink, 1998).

Aktor-aktor yang lebih kuat yang dimaksud yaitu *Consumer Brand* yang notabene merupakan perusahaan yang dipasok oleh Wilmar International. Berdasarkan hasil riset dan investigasi yang dilakukan, Greenpeace Indonesia mengadakan pertemuan dan memberitahukan hasil riset dan investigasi yang ada. Laporan tersebut ternyata membuat para *Consumer Brand* terancam sehingga mereka mau membuka dialog dengan Greenpeace Indonesia. Kepada *Consumer Brand*, Greenpeace Indonesia meminta komitmen mereka untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi, termasuk dari Wilmar International. Hasil lobi ini menghasilkan adanya komitmen dari para *Consumer Brand* untuk menggunakan minyak kelapa sawit hasil non-deforestasi (Talocchi, 2014) (Mondelez, 2014) (General Mills, 2014) (Union of Concerned Scientists, 2014).

Greenpeace Indonesia memilih menekan perusahaan-perusahaan besar yang merupakan konsumen dengan Wilmar International dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap reputasi Wilmar International sebagai salah satu pedagang minyak kelapa sawit terbesar dunia. Reputasi Wilmar International dimata perusahaan-perusahaan konsumennya menjadi penting karena reputasi suatu perusahaan memiliki nilai moneter dan dapat menjadi bagian integral dari bisnis. Reputasi perusahaan memiliki nilai ekonomi seperti meningkatkan penerimaan pasar, memfasilitasi hubungan bisnis berdasarkan kepercayaan dan nilai, dan meningkatkan kemampuan untuk menarik investor serta konsumen ke perusahaan tersebut (Friman, 2015). Selain reputasi, Greenpeace Indonesia memilih menekan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi konsumen dari Wilmar International dikarenakan agar menarik perhatian masyarakat luas serta untuk memberikan dampak penekanan yang juga lebih besar kepada Wilmar International. Hal yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia merupakan manifestasi dari model analisa Gritten dan Mola-Yudego (2010) yaitu *Blanket Strategy* dimana NGO melakukan tekanan terhadap pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan aktor target, dalam hal ini *consumer brand* yang menjadi konsumen dari Wilmar

International, untuk selanjutnya tekanan tersebut diteruskan oleh pihak ketiga kepada aktor target.

Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menekan Uni Eropa melalui jaringannya di Uni Eropa. Greenpeace Uni Eropa sebagai jejaring dari Greenpeace Indonesia meminta Uni Eropa sebagai negara konsumen minyak kelapa sawit untuk memperhatikan produsen minyak kelapa sawit mana yang menggunakan prinsip perkebunan berkelanjutan sehingga Uni Eropa mengonsumsi minyak kelapa sawit yang diproduksi hanya dari negara yang menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan. Hal tersebut diperlihatkan dari pernyataan Sebastien Risso, Direktur Kebijakan Hutan Greenpeace di Uni Eropa yang pada tahun 2017 (Greenpeace European Unit, 2017).

Dari pernyataan Risso terlihat bahwa tindakan nyata yang diinginkan oleh Greenpeace terhadap Uni Eropa adalah adanya regulasi yang bisa menjamin tidak adanya penggunaan minyak kelapa sawit yang tidak memperhatikan prinsip perkebunan berkelanjutan. Sebelumnya, Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa berjudul *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) yang dikeluarkan pada 4 April 2017. Latar belakang resolusi tersebut adalah Parlemen Eropa merasa bahwa perlu adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi standar perkebunan berkelanjutan. Sertifikasi yang ada juga dirasa sifatnya tidak mandatoris dan mengikat terhadap produsen-produsen kelapa sawit sehingga Uni Eropa dirasa perlu untuk membuat regulasi yang sifatnya mandatoris dan mengikat.

Pada tahun 2018, Greenpeace Uni Eropa juga mendesak Uni Eropa untuk melakukan tindakan nyata guna menanggulangi praktik Deforestasi global. Desakan ini mendapatkan respon dari Uni Eropa melalui pembentukan Arahan Energi Terbarukan (*Renewable Energy Directive/ RED II*) yang dituangkan dalam regulasi turunan (*Delegated Act*). Dalam regulasi tersebut, terdapat konsep *Indirect Land Use Change* (ILUC) dimana konsep tersebut menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Pelarangannya sendiri dimulai sejak tahun 2024 dan akan berlaku total pada tahun 2030 (BBC Indonesia, 2019). Regulasi ini sebenarnya buah dari tidak transparannya data konsesi kelapa sawit di Indonesia. Respon pemerintah Indonesia untuk membuka data konsesi ini hampir selalu menolak (BBC Indonesia, 2019), sama seperti halnya Wilmar International yang selalu berdalih ketika diminta data konsesi oleh publik—termasuk Greenpeace Indonesia.

Sontak kebijakan RED II mengundang perhatian dari para *stakeholders* industri sawit Indonesia. Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi, apabila tidak ada kebijakan yang sifatnya luar biasa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, maka industri sawit nasional dalam bahaya (Redaksi Warta Ekonomi Online, 2019). Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Bersama dengan Malaysia, Pemerintah Indonesia mengirimkan surat keberatan terhadap kebijakan tersebut (Friana, 2019). Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia keberatan atas kebijakan tersebut dikarenakan dalam kebijakan RED II, kelapa sawit ditetapkan sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi. Hal ini ditambah dengan upaya Uni Eropa mencoba untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit pada biofuel.

Oleh karena sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia, harga komoditas minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global pun mengalami penurunan (BBC Indonesia, 2019) (Gumilar, 2019) (Susanto, 2019), yang turut juga berimbas pada pedagang-pedagang kelapa sawit Indonesia, termasuk Wilmar International. Tidak hanya harga komoditas sawit yang turun, tetapi *stakeholders* sawit juga mengeluhkan adanya gejolak sosial dan ekonomi akibat sikap diskriminatif Uni Eropa. Menurut Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung, Uni Eropa juga harus memperhatikan pekerja yang berada dalam sektor industri sawit (Suhendra,

2019). Menurutnya, pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit di Indonesia menyerap pekerja sebanyak 16,2 juta jiwa.

Strategi *leverage politics* merupakan manifestasi dari model analisa *boomerang pattern* dimana NGO menggunakan pihak ketiga yaitu jejaringnya di Uni Eropa dan menekan *consumer brand* yang memiliki *power* yang setara dengan aktor target (Keck & Sikkink, 1998). Hal ini dilakukan karena ada *blockage* atau restriksi dari aktor target dalam merubah perilakunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh NGO terkait. Dalam konteks ini, Wilmar International melakukan *blockage* terhadap Greenpeace Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan kebijakan NDPE. Pada bulan Mei 2018, Greenpeace Indonesia meminta kepada 25 kelompok dagang, termasuk Wilmar International, untuk mengkonfirmasi apakah mereka berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE setelah sebelumnya pada November 2017 Greenpeace Indonesia menunjukkan kepada Wilmar International beserta para pedagang kelapa sawit lainnya bahwa mereka melanggar kebijakan NDPE. Wilmar International beserta para pedagang kelapa sawit lainnya tidak menyatakan kesimpulan jelas bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur NDPE. Sebaliknya, Wilmar International beserta para pedagang kelapa sawit lainnya mengklaim bahwa sistem NDPE telah berjalan dengan baik. CEO Wilmar International Kuok Khoon Hong, mengklaim bahwa Wilmar International selalu berada di jalur yang benar dalam mengimplementasikan kebijakan NDPE (Hong, 2018). Bahkan, ketika masalah-masalah dalam konsesi-konsesi tertentu ditunjukkan kepada Wilmar International, mereka tidak mau melakukan penyelidikan secara menyeluruh di semua konsesinya. Hal ini menunjukkan bahwa Wilmar International lebih memilih untuk tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemasoknya.

### Accountability Politics

Setelah melalui strategi *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*, aka strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yaitu strategi *Accountability Politics*. Menurut Keck and Sikkink (1999), *Accountability Politics* merupakan strategi untuk mengikat atau memperoleh komitmen dari aktor target untuk menjalankan perubahan kebijakan atau perilaku. Komitmen tersebut berbentuk dokumen legal tertulis untuk memastikan aktor target benar-benar melaksanakan perubahan kebijakan atau perilaku yang diinginkan oleh NGO terkait, karena komitmen dalam bentuk verbal atau lainnya tidak dapat memastikan pelaksanaan perubahan kebijakan atau perilaku sepenuhnya. Strategi ini digunakan Greenpeace Indonesia terhadap Wilmar International maupun *consumer brand* yang menjadi konsumen dari Wilmar International.

Greenpeace Indonesia mengumpulkan dokumen tertulis dari komitmen *Multi National Company* tersebut untuk berhenti menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi (Talocchi, 2014) (Mondelez, 2014) (General Mills, 2014) (Union of Concerned Scientists, 2014). Apabila kita melihat rilis-rilis dokumen tersebut menggunakan perspektif hukum, dokumen yang dirilis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Sistem pembuktian hukum di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Undang-undang telah mengatur secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti (Harahap, 2012). Dalam pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan–persangkaan, alat bukti berupa pengakuan dan alat bukti sumpah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), ada enam jenis alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan/atau alat bukti

lain termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan pelaksana dari HIR maupun UU PPLH tidak ada penjelasan lanjut mengenai *press release* atau *joint statement* bisa digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan dalam konteks hukum internasional, rilis-rilis yang dikeluarkan kepada publik merupakan bentuk *moral obligation*, dimana menurut *Black's Law Dictionary* (1990), *moral obligation* merupakan *Tugas yang hanya didasarkan pada hati nurani seseorang dan itu tidak dapat ditegakkan secara hukum*. Hal ini menyebabkan Wilmar International beserta perusahaan rekanannya tidak memiliki keterikatan secara khusus dengan hukum dalam menjalankan komitmen kebijakan NDPE. Wilmar International beserta perusahaan rekanannya memiliki tanggungjawab kepada publik karena rilis yang dikeluarkan dinyatakan di publik.

## SIMPULAN

Dalam penelitian studi kasus ini, kita dapat melihat interaksi antara aktor non-negara dengan aktor non-negara lain maupun organisasi regional dalam skala internasional. Greenpeace Indonesia menjalankan interaksi-interaksi tersebut dengan menggunakan empat strategi dari Keck and Sikkink yang dijelaskan sebelumnya sebagai bentuk dari *political move*. Aktor-aktor non-negara maupun organisasi regional ini merupakan aktor-aktor internasional, seperti perusahaan multinasional pelanggan dari Wilmar International hingga Uni Eropa.

Dari keempat strategi dari teori Jaringan Advokasi Transnasional, dapat disimpulkan bahwa Greenpeace Indonesia telah secara optimal membentuk jaringan advokasi transnasional di negara-negara yang memiliki concern terhadap isu lingkungan seperti Greenpeace US dan Greenpeace Uni Eropa lewat strategi *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan menekan Wilmar International lewat strategi *Leverage Politics*. Akan tetapi, dalam membangun jaringan advokasinya dengan NGO lingkungan lokal seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, Yayasan Pusaka, hanya strategi *information politics* yang optimal dilakukan oleh Greenpeace Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh eksklusifitas dari Greenpeace Indonesia dalam setiap aksinya dan jejaring yang sudah besar di lingkup transnasional sehingga Greenpeace Indonesia melakukan tekanan melalui jejaring yang sudah ada tanpa perlu membangun jejaringnya dari awal. Sedangkan untuk strategi *Accountability Politics*, dapat dikatakan bahwa Greenpeace Indonesia tidak optimal menggunakan strategi ini dalam kasus isu deforestasi hutan Indonesia yang dilakukan oleh Wilmar International pada kurun waktu 2013 hingga 2018.

Guna membantu gerakan Greenpeace Indonesia dan NGO lingkungan lainnya lebih masif, maka persebaran informasi yang dilakukan harus memperhatikan momentum yang tepat sehingga gerakannya dapat teramplifikasi dan dapat memiliki tekanan yang lebih kuat sehingga dapat mendesak aktor target. Berikutnya, guna dapat mengikat aktor target untuk berkomitmen menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh suatu NGO, maka Greenpeace Indonesia atau NGO lingkungan lainnya perlu mendapatkan bukti komitmen berupa dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yuridiksi masing-masing. Selain itu, Greenpeace Indonesia atau NGO lingkungan lainnya perlu memperhatikan inklusifitas dari setiap gerakan yang dilakukan sehingga gerakannya dapat teramplifikasi dengan baik. Dalam setiap advokasi yang dilakukan oleh NGO, corak konfliktual tidaklah selalu cocok pada setiap aktor target dan konstelasi politik tempat NGO bersangkutan beroperasi, sehingga ke depannya NGO perlu mengidentifikasi karakteristik dari aktor target beserta konstelasi politik tempat NGO bersangkutan beroperasi.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

---

- Ammurabi, S. D. (2019, September 5). *Wajibkan Sertifikasi Kelapa Sawit, Uni Eropa Belum Akui ISPO*. Retrieved from Gatra.com:  
<https://www.gatra.com/detail/news/442628/ekonomi/wajibkan-sertifikasi-kelapa-sawit-uni-eropa-belum-akui-ispo>
- Austin, K. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero deforestation commitment. *Land Use Policy Vol. 69*, 41-48.
- Austin, K. G. (2019). What Causes Deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*.
- Badan Pusat Statistik, B. (2018). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*. Jakarta: CV. Dharmaputra.
- BBC Indonesia, B. (2018, November 18). *Protes Kelapa Sawit, Aktivis Greenpeace Ditahan Di Atas Kapal Tanker*. Retrieved June 26, 2019, from BBC Indonesia:  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46252167>
- BBC Indonesia, B. (2019, March 23). *Kelapa sawit, ancaman perang dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya*. Retrieved June 25, 2019, from BBC Indonesia:  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*. Minn: West Publishing Co.
- Brown, E., & Jacobson, M. (2005). *Cruel oil: how palm oil harms health, rainforest, and wildlife*. Washington D.C: Center for Science in the Public Interest.
- Cresswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daubach, T. (2018, July 5). *Executives of palm oil giant Wilmar resign a week after Greenpeace report*. Retrieved from Eco-Business: <https://www.eco-business.com/news/executives-of-palm-oil-giant-wilmar-resign-a-week-after-greenpeace-report/>
- European Union, E. U. (2017, April 4). *Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Retrieved July 22, 2019, from European Parliament of European Union:  
[http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0066\\_EN.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0066_EN.html)
- Fargione, J., J. Hill, D., Tilman, S., Polasky, & Hawthorne, P. (2008). Land clearing and the biofuel carbon debt. *Science 319 Issue 5867*, 1235-1238.
- Friana, H. (2019, April 8). *Protes Kebijakan RED II, Jokowi & Mahathir Kirim Surat Ke Uni Eropa*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/protes-kebijakan-red-ii-jokowi-mahathir-kirim-surat-ke-uni-eropa-dlvn>

- Friman, H. (2015). *The Politics of Leverage in International Relations*. Milwaukee: Palgrave Macmillan UK.
- General Mills, G. M. (2014, July). *Statement on responsible palm oil sourcing*. Retrieved June 21, 2019, from General Mills: <https://www.generalmills.com/en/News/Issues/palm-oil-statement>
- Greenpeace European Unit, G. (2017, April 4). *EU Must Stop Palm Oil Deforestation, Says European Parliament Palm Oil Industry Identified as Major Cause of Forest Destruction*. Retrieved June 26, 2019, from Greenpeace European Union: <https://www.greenpeace.org/archive-eu-unit/en/News/2017/EU-stop-palm-oil-deforestation-Parliament/>
- Greenpeace Indonesia. (2018, December 10). *Terobosan baru Wilmar agar para perusak hutan tidak dapat bersembunyi*. Retrieved January 5, 2019, from Greenpeace Indonesia: <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Terobosan-baru-Wilmar-agar-para-perusak-hutan-tidak-dapat-bersembunyi/>
- Greenpeace Indonesia, G. (2013). *License To Kill*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2015). *Under Fire*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2016). *Deadly Trade-Off*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2017). *Dirty Bankers*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2018). *Final Countdown*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2018). *Moment of Truth*. Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia, G. (2018, June). *Rogue Trader*. Retrieved from Greenpeace Indonesia: [https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/report\\_-\\_gp\\_ind\\_rogue\\_v6.1\\_pages](https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/report_-_gp_ind_rogue_v6.1_pages)
- Gritten, D., & Mola-Yudego, B. (2010, August). *blanket Strategy: A response of environmental groups to globalizing forest industry*. *International Journal of The Commons*, 4, 729-757.
- Gumilar, P. (2019, May 6). *Diskriminasi Uni Eropa Mulai Terasa di Industri Hulu Sawit RI*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190506/99/919060/diskriminasi-uni-eropa-mulai-terasa-di-industri-hulu-sawit-ri>
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hong, K. K. (2018, July 4). *Wilmar International*. Retrieved Januari 22, 2020, from Letter from Kuok Khoon Hong to KikiTaufik, Green Southeast Asia: <http://www.Wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/07/WIL-let-ter-dtd-04-July-2018-to-Greenpeace.pdf>

- Kabar Energi, K. (2018, July 5). *Perusahaan Minyak Sawit Raksasa Wilmar Tersangkut Skandal Perusakan Hutan*. Retrieved May 2019, 5, from Kabar Energi: <https://kabar-energi.com/2018/07/05/perusahaan-minyak-sawit-raksasa-wilmar-tersangkut-skandal-perusakan-hutan/>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. New York: Cornell University.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Network in Internasional Relations and Regional Politics*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Koplitz SN, e. a. (2016). Public Health Impacts of The Severe Haze In Equatorial Asia in September-October 2015: Demonstration of A Framework for Informing Fire Management Strategies to Reduce Downwind Smoke Exposure. *Environmental Research 11(9)*.
- Mansell, R., & Wehn, U. (1998). *Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Mate, J. (2001). Making a Difference: A Case Study of the Greenpeace Ozone Campaign . *Review of European Community & International Environmental Law*, 190-198.
- Mondelez. (2014, June). *Mondelez International Palm Action Plan*. Retrieved June 21, 2019, from Mondelez International: [https://www.mondelezinternational.com/~/\\_media/MondelezCorporate/uploads/downloads/Palm\\_Oil\\_Action\\_Plan.pdf](https://www.mondelezinternational.com/~/_media/MondelezCorporate/uploads/downloads/Palm_Oil_Action_Plan.pdf)
- O'Rourke, D. (2005). Market Movements: NGO Strategies to Influence Global Production and Consumption. *Journal of Industrial Ecology*, 9 (1-2), 115-128.
- Pink, B. (2019, July 31). *Tangkal Serangan Uni Eropa Terhadap Sawit, Pemerintah Perkuat ISPO*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/tangkal-serangan-uni-eropa-terhadap-sawit-pemerintah-perkuat-ispo?page=all>
- Redaksi Warta Ekonomi Online, W. E. (2019, August 4). *Kebijakan RED II Uni Eropa Jadi Perhatian Pemerintah Terhadap Industri Sawit*. Retrieved from Wartaekonomi.co.id: <https://www.wartaekonomi.co.id/read239340/kebijakan-red-ii-uni-eropa-jadi-perhatian-pemerintah-terhadap-industri-sawit.html>
- Reily, M. (2018, November 21). *Pengusaha Sawit Sebut Greenpeace Ganggu Kedaulatan Indonesia*. Retrieved June 18, 2019, from Kata Data: <https://katadata.co.id/berita/2018/11/21/pengusaha-sawit-sebut-greenpeace-ganggu-kedaulatan-indonesia>
- Rootes, C. (2013). From Local Conflict to National Issue: When and How Environmental Campaigns Succeed in Transcending The Local. *Environmental Politics*, 22:1, 95-114.

- Safitri, K. (2018, November 20). *Wilmar Menyebut Greenpeace Hanya Ingin Minta Peta Konsesi dan Peta Pasokan*. Retrieved January 5, 2019, from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/wilmar-menyebut-greenpeace-hanya-ingin-minta-peta-konsesi-dan-peta-pasokan>
- Situmorang, A. (2013). *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Z. (2019, April 24). *Jutaan Pekerja Industri Sawit Terancam Kebijakan Uni Eropa*. Retrieved from Detik.com: <https://finance.detik.com/industri/d-4523488/jutaan-pekerja-industri-sawit-terancam-kebijakan-uni-eropa>
- Susanto, V. Y. (2019, March 14). *Harga CPO Ambles 1,39% Akibat Keputusan Uni Eropa* . Retrieved from Kontan.co.id: <https://investasi.kontan.co.id/news/harga-cpo-ambles-139-akibat-keputusan-uni-eropa>
- Talocchi, J. (2014, April 8). *Consumer power! Procter & Gamble commits to forest-friendly palm oil*. Retrieved June 21, 2019, from Greenpeace USA: <https://www.greenpeace.org/usa/consumer-power-procter-gamble-decides-wash-bad-palm-oil-away/>
- Titiyoga, G. W. (2015, Maret 5). *Indonesia Peringkat 6 Penyumbang Karbon Dunia*. Retrieved December 4, 2018, from Tempo.co: <https://tekno.tempo.co/read/647425/indonesia-peringkat-6-penyumbang-karbon-dunia/full&view=ok>
- Union of Concerned Scientists, S. f. (2014, March 24). *General Mills Commits to Deforestation-Free Palm Oil*. Retrieved June 21, 2019, from Union of Concerned Scientists, Science for a Healthy Planet and Safer World: <https://www.ucsusa.org/news/commentary/general-mills-deforestation-free-palm-oil-0404.html>
- Wihardandi, A. (2013, June 26). *Perusahaan Kelapa Sawit Yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan Alami Penurunan Harga Saham*. Retrieved May 6, 2019, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2013/06/26/perusahaan-kelapa-sawit-yang-diduga-terlibat-pembakaran-hutan-alami-penurunan-harga-saham/>